



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN BAGIAN DARI DANA BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Tata Cara Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan bagian dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN BAGIAN DARI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Batang.
6. Camat adalah Kepala wilayah Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada diwilayah Kabupaten Batang.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas

dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

12. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PPB-PP adalah Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan.

BAB II

SUMBER DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Pasal 2

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi bagian Desa ditetapkan sebagai berikut :

- a. 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan pajak daerah;
- b. 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan retribusi daerah.

BAB III

PENENTUAN BESARAN BAGIAN DESA DARI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Rumus yang dipergunakan dalam penentuan besaran bagian desa dari pajak dan retribusi daerah adalah :
- a. Asas Merata adalah besaran bagian pajak dan retribusi daerah yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut BHPRM;
 - b. Asas Adil adalah besar bagian pajak dan retribusi daerah secara proporsional berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel-variabel yang selanjutnya disebut BHPRP.
- (2) Rumus untuk menentukan pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

- a. $BHX = BHPRM + BHPRPX$

Keterangan :

BHX : Bagi Hasil untuk Desa X

BHPRM : Bagi Hasil Minimal yang diterima Desa.

BHPRPX : Bagi Hasil Proporsional untuk Desa X.

- b. $BHPRX = BDX \times (BH - \Sigma BHPR)$

Keterangan :

BHPRPx : Bagi Hasil proporsional untuk Desa X

BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa X

BHPR : Total Bagi Hasil untuk Kabupaten

$\Sigma BHPR$: Jumlah seluruh Dana Bagi Hasil Minimal.

- (3) Besarnya penetapan Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Besarnya penetapan bagian desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Desa diatur sebesar 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata dan 40% (empat puluh perseratus) dibagi Proporsional dibagi berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari Desa masing-masing.
- (5) Penetapan besaran alokasi Bagian Desa dari Dana bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disosialisasikan Kepada Pemerintah Desa melalui Kecamatan.

BAB IV

PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

Pengelolaan bagian Desa dari Dana Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan tanggung jawab Kepala Desa Selaku Pemegang Kekuasaan umum keuangan Desa.

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap Tahun Anggaran.
- (2) Permohonan pencairan bagian desa dari dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan oleh Kepala Desa setelah APBDesa tahun berkenaan ditetapkan.
- (3) Surat permohonan pencairan dana sebagaimana disebutkan pada ayat (2) ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi oleh Camat.
- (5) Dalam hasil verifikasi sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan, maka Camat membuat daftar rekapitulasi permohonan yang diajukan Desa untuk disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dispermades.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan, maka Kepala Dispermades mengajukan proses pencairan dana kepada BPKPAD.

- (7) BPKPAD memproses pencairan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah menerima pengajuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) BPKPAD menstransfer dana melalui rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.

Pasal 6

- (1) Penyaluran bagian dana dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. tahap I pada bulan Mei sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
 - b. tahap II pada bulan September sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Penyaluran bagian Desa dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah APBD Kabupaten Batang ditetapkan dengan mengikuti realisasi dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Kurang salur/lebih salur Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan Alokasi Dana Bagian Desa dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (4) Alokasi Dana Bagian Desa dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kurang salur/lebih salur untuk masing-masing desa ditetapkan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Tahapan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penyaluran tahap I sebesar 50% (lima puluh perseratus), dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menerima Laporan Realisasi Penyerapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap II Tahun Anggaran sebelumnya.
- b. penyaluran tahap II sebesar 50% (lima puluh perseratus), dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menerima Laporan Realisasi Penyerapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap I Tahun Anggaran berjalan.

BAB VI

PENGUNAAN BAGIAN DESA DARI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dipergunakan untuk Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk belanja :
 - a. Administrasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan.
 - b. Pendataan Wajib Pajak Baru.
 - c. Penyelesaian Permasalahan PBB-PP di Tingkat Desa.
- (3) Belanja pemberdayaan masyarakat Desa digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan kelembagaan kemasyarakatan desa :
 - a. PKK
untuk biaya operasional, SPPD, biaya rapat, pakaian kerja, biaya sosialisasi dan kegiatan lainnya.
 - b. LPMD
untuk biaya rapat, biaya operasional, SPPD, insentif dan biaya sosialisasi.
 - c. Karang Taruna
untuk biaya operasional, SPPD dan biaya sosialisasi.
 - d. KPMD
untuk biaya operasional, SPPD, insentif, biaya rapat dan biaya sosialisasi.
 - e. BUMDes
untuk SPPD, biaya rapat dan kegiatan sosialisasi.
 - f. dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (4) Alokasi belanja penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan maksimal sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Alokasi belanja penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan maksimal sebesar 80% (delapan puluh persen).

BAB VII

PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 9

Penerimaan dan Pengeluaran Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan pada APBDes.

Pasal 10

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VIII

PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Pertanggungjawaban Bagian Desa dari Dana Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

Pasal 12

Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes yang dibiayai Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa adalah Laporan realisasi penerimaan dan realisasi belanja Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dan Camat sebagai pembina pelaksanaan pengelolaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Desa.

Pasal 14

Pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) meliputi :

- a. Memberikan sosialisasi dan pengarahan pengelolaan Bagian Desa dari Dana bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Desa;
- b. Memberi bimbingan dan pelatihan dalam pengelolaan keuangan Bagian Desa dari dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Desa;
- c. Membina dan mengawasi pengelolaan Bagian Desa dari dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa.

BAB X
PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 25 Januari 2017

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 25 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

SRI SUGENG PRIYANTO, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19701114 199412 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 9 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK
 DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

**RINCIAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI SETIAP DESA
 KABUPATEN BATANG TAHUN 2017**

No	DESA	JUMLAH BAGI HASIL PAJAK	TAHAP I 50%	TAHAP II 50%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KEC. WONOTUNGGAL				
1	SILURAH	18,261,000	9,130,500	9,130,500
2	SODONG	18,913,000	9,456,500	9,456,500
3	GRINGGINGSARI	20,682,000	10,341,000	10,341,000
4	KEDUNGMALANG	20,557,000	10,278,500	10,278,500
5	SENDANG	22,904,000	11,452,000	11,452,000
6	WONOTUNGGAL	40,946,000	20,473,000	20,473,000
7	BROKOH	24,200,000	12,100,000	12,100,000
8	WATES	27,345,000	13,672,500	13,672,500
9	BRAYO	21,320,000	10,660,000	10,660,000
10	KEMLIGI	19,803,000	9,901,500	9,901,500
11	SIGAYAM	21,850,000	10,925,000	10,925,000
12	KREYO	19,330,000	9,665,000	9,665,000
13	SIWATU	28,501,000	14,250,500	14,250,500
14	DRINGO	21,608,000	10,804,000	10,804,000
15	PENANGKAN	20,045,000	10,022,500	10,022,500
KEC. BANDAR				
16	TOMBO	22,359,000	11,179,500	11,179,500
17	WONOMERTO	22,980,000	11,490,000	11,490,000
18	WONODADI	20,458,000	10,229,000	10,229,000
19	PESALAKAN	23,111,000	11,555,500	11,555,500
20	BINANGUN	26,095,000	13,047,500	13,047,500
21	SIDAYU	25,378,000	12,689,000	12,689,000
22	TOSO	24,876,000	12,438,000	12,438,000
23	KLUWIH	35,590,000	17,795,000	17,795,000
24	WONOKERTO	29,068,000	14,534,000	14,534,000
25	BANDAR	35,819,000	17,909,500	17,909,500
26	TUMBREP	29,174,000	14,587,000	14,587,000
27	TAMBAHREJO	31,152,000	15,576,000	15,576,000
28	PUCANGGADING	24,636,000	12,318,000	12,318,000
29	CANDI	22,700,000	11,350,000	11,350,000
30	WONOSEGORO	24,572,000	12,286,000	12,286,000
31	SIMPAR	25,598,000	12,799,000	12,799,000
32	BATIOMBO	22,854,000	11,427,000	11,427,000
KEC. BLADO				
33	GERLANG	25,206,000	12,603,000	12,603,000
34	KALITENGAH	16,152,116	8,076,058	8,076,058
35	KEMBANGLANGIT	18,080,000	9,040,000	9,040,000
36	GONDANG	18,502,000	9,251,000	9,251,000
37	BISMO	20,747,000	10,373,500	10,373,500
38	KETELENG	20,708,000	10,354,000	10,354,000

No	DESA	JUMLAH BAGI HASIL PAJAK	TAHAP I 50%	TAHAP II 50%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
39	KALISARI	21,148,000	10,574,000	10,574,000
40	BESANI	23,697,000	11,848,500	11,848,500
41	WONOBODRO	26,174,000	13,087,000	13,087,000
42	BAWANG	20,913,000	10,456,500	10,456,500
43	PESANTREN	21,053,000	10,526,500	10,526,500
44	KAMBANGAN	28,386,000	14,193,000	14,193,000
45	KEPUTON	23,232,000	11,616,000	11,616,000
46	BLADO	31,296,000	15,648,000	15,648,000
47	COKRO	26,213,000	13,106,500	13,106,500
48	SELOPAJANG BARAT	23,306,000	11,653,000	11,653,000
49	KALIPANCUR	21,845,000	10,922,500	10,922,500
50	SELOPAJANG TIMUR	22,714,000	11,357,000	11,357,000
	KEC. REBAN			
51	PACET	18,208,000	9,104,000	9,104,000
52	MOJOTENGAH	21,432,000	10,716,000	10,716,000
53	CABLIKAN	18,895,000	9,447,500	9,447,500
54	NGROTO	19,381,000	9,690,500	9,690,500
55	NGADIREJO	23,075,000	11,537,500	11,537,500
56	REBAN	24,511,000	12,255,500	12,255,500
57	TAMBAKBOYO	22,600,000	11,300,000	11,300,000
58	ADINUSO	24,740,000	12,370,000	12,370,000
59	KUMESU	27,871,000	13,935,500	13,935,500
60	KEPUNDUNG	19,073,000	9,536,500	9,536,500
61	PADOMASAN	21,180,000	10,590,000	10,590,000
62	SEMAMPIR	22,509,000	11,254,500	11,254,500
63	WONOSOBO	26,422,000	13,211,000	13,211,000
64	SOJOMERTO	25,396,000	12,698,000	12,698,000
65	KARANGANYAR	20,856,000	10,428,000	10,428,000
66	POLODORO	21,729,000	10,864,500	10,864,500
67	KALISARI	19,628,000	9,814,000	9,814,000
68	SUKOMANGLI	21,981,000	10,990,500	10,990,500
69	WONOROJO	19,802,000	9,901,000	9,901,000
	KEC. BAWANG			
70	PRANTEN	18,456,000	9,228,000	9,228,000
71	DELES	23,553,000	11,776,500	11,776,500
72	GUNUNGSARI	19,740,000	9,870,000	9,870,000
73	JAMBANGAN	23,499,000	11,749,500	11,749,500
74	KEBATURAN	19,017,000	9,508,500	9,508,500
75	KALIREJO	25,012,000	12,506,000	12,506,000
76	SANGUBANYU	25,108,000	12,554,000	12,554,000
77	WONOSARI	25,980,000	12,990,000	12,990,000
78	JLAMPRANG	18,993,000	9,496,500	9,496,500
79	BAWANG	29,090,000	14,545,000	14,545,000
80	CANDIGUGUR	26,287,000	13,143,500	13,143,500
81	PANGEMPON	17,948,000	8,974,000	8,974,000
82	SIDOHARJO	22,578,000	11,289,000	11,289,000
83	SURJO	27,882,000	13,941,000	13,941,000
84	SOKA	20,731,000	10,365,500	10,365,500
85	SIBEBEK	21,791,000	10,895,500	10,895,500
86	GETAS	22,132,000	11,066,000	11,066,000

No	DESA	JUMLAH BAGI HASIL PAJAK	TAHAP I 50%	TAHAP II 50%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
87	PASUSUKAN	18,799,000	9,399,500	9,399,500
88	CANDIREJO	21,818,000	10,909,000	10,909,000
89	PURBO	24,721,000	12,360,500	12,360,500
	KEC. TERSONO			
90	SENDANG	19,902,000	9,951,000	9,951,000
91	REJOSARI BARAT	25,110,000	12,555,000	12,555,000
92	REJOSARI TIMUR	20,621,000	10,310,500	10,310,500
93	KRANGGAN	25,819,000	12,909,500	12,909,500
94	TANJUNGSARI	25,879,000	12,939,500	12,939,500
95	SATRIYAN	21,627,000	10,813,500	10,813,500
96	TERSONO	27,150,000	13,575,000	13,575,000
97	PUJUD	23,818,000	11,909,000	11,909,000
98	BOJA	21,318,000	10,659,000	10,659,000
99	HARJOWINANGUN TIMUR	20,699,000	10,349,500	10,349,500
100	HARJOWINANGUN BARAT	22,114,000	11,057,000	11,057,000
101	KEBUMEN	28,148,000	14,074,000	14,074,000
102	TEGALOMBO	21,534,000	10,767,000	10,767,000
103	MARGOSONO	19,154,000	9,577,000	9,577,000
104	PLOSOWANGI	21,480,000	10,740,000	10,740,000
105	SIDALANG	22,177,000	11,088,500	11,088,500
106	WANAR	22,964,000	11,482,000	11,482,000
107	SUMUR BANGER	22,985,000	11,492,500	11,492,500
108	BANTENG	21,942,000	10,971,000	10,971,000
109	GONDO	21,961,000	10,980,500	10,980,500
	KEC. GRINGSING			
110	KUTOSARI	38,899,000	19,449,500	19,449,500
111	MENTOSARI	22,866,000	11,433,000	11,433,000
112	PLELEN	43,060,000	21,530,000	21,530,000
113	SURODADI	42,749,000	21,374,500	21,374,500
114	GRINGSING	30,587,000	15,293,500	15,293,500
115	SENTUL	23,927,000	11,963,500	11,963,500
116	SAWANGAN	35,135,000	17,567,500	17,567,500
117	LEBO	35,657,000	17,828,500	17,828,500
118	KRENGSENG	32,172,000	16,086,000	16,086,000
119	KEBONDALEM	26,159,000	13,079,500	13,079,500
120	YOSOREJO	30,473,000	15,236,500	15,236,500
121	SIDOREJO	24,135,000	12,067,500	12,067,500
122	KETANGGAN	32,517,000	16,258,500	16,258,500
123	MADUGOWONG JATI	25,842,000	12,921,000	12,921,000
124	TEDUNAN	21,525,000	10,762,500	10,762,500
	KEC. LIMPUNG			
125	NGALIYAN	21,913,000	10,956,500	10,956,500
126	SUKOREJO	24,413,000	12,206,500	12,206,500
127	TEMBOK	24,500,000	12,250,000	12,250,000
128	DONOREJO	21,051,000	10,525,500	10,525,500
129	SIDOMULYO	25,579,000	12,789,500	12,789,500
130	KALISALAK	22,726,000	11,363,000	11,363,000
131	LIMPUNG	51,386,000	25,693,000	25,693,000
132	KEPUH	18,871,000	9,435,500	9,435,500
133	SEMPU	48,063,000	24,031,500	24,031,500

No	DESA	JUMLAH BAGI HASIL PAJAK	TAHAP I 50%	TAHAP II 50%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
134	BABADAN	32,524,000	16,262,000	16,262,000
135	PLUMBON	23,115,000	11,557,500	11,557,500
136	AMONGROGO	22,985,000	11,492,500	11,492,500
137	DLISEN	22,625,000	11,312,500	11,312,500
138	ROWOSARI	22,387,000	11,193,500	11,193,500
139	PUNGANGAN	22,368,000	11,184,000	11,184,000
140	LOBANG	21,832,000	10,916,000	10,916,000
141	WONOKERSO	24,258,000	12,129,000	12,129,000
	KEC. SUBAH			
142	MENJANGAN	23,200,000	11,600,000	11,600,000
143	KARANGTENGAH	26,189,000	13,094,500	13,094,500
144	MANGUN HARJO	23,321,000	11,660,500	11,660,500
145	TENGGULANGHARJO	22,707,000	11,353,500	11,353,500
146	KEBORANGAN	18,712,000	9,356,000	9,356,000
147	KALIMANGGIS	21,730,000	10,865,000	10,865,000
148	JATISARI	23,423,000	11,711,500	11,711,500
149	SUBAH	31,714,000	15,857,000	15,857,000
150	KUMEJING	20,130,000	10,065,000	10,065,000
151	ADINUSO	24,881,000	12,440,500	12,440,500
152	DURENOMBO	23,893,000	11,946,500	11,946,500
153	CLAPAR	27,918,000	13,959,000	13,959,000
154	SENGON	33,671,000	16,835,500	16,835,500
155	GONDANG	28,686,000	14,343,000	14,343,000
156	KURIPAN	22,199,000	11,099,500	11,099,500
157	KEMIRI BARAT	27,887,000	13,943,500	13,943,500
158	KEMIRI TIMUR	24,202,000	12,101,000	12,101,000
	KEC. TULIS			
159	WRINGINGINTUNG	26,883,000	13,441,500	13,441,500
160	SEMBOJO	18,059,000	9,029,500	9,029,500
161	POSONG	20,426,000	10,213,000	10,213,000
162	KALIBOYO	21,321,000	10,660,500	10,660,500
163	SIMBANGDESA	21,415,000	10,707,500	10,707,500
164	BEJI	28,171,000	14,085,500	14,085,500
165	TULIS	35,684,000	17,842,000	17,842,000
166	SIMBANGJATI	27,330,000	13,665,000	13,665,000
167	KEDUNGSEGOG	29,600,000	14,800,000	14,800,000
168	KENCONOREJO	65,937,000	32,968,500	32,968,500
169	PONOWARENG	31,365,000	15,682,500	15,682,500
170	SIBERUK	19,973,000	9,986,500	9,986,500
171	KEBUMEN	24,809,000	12,404,500	12,404,500
172	CLUWUK	18,349,000	9,174,500	9,174,500
173	JRAKAHPAYUNG	26,720,000	13,360,000	13,360,000
174	JOLOSEKTI	22,995,000	11,497,500	11,497,500
175	MANGGIS	20,862,000	10,431,000	10,431,000
	KEC. WARUNGASEM			
176	PANDANSARI	24,041,000	12,020,500	12,020,500
177	KALIWARENG	22,575,000	11,287,500	11,287,500
178	PEJAMBON	19,459,000	9,729,500	9,729,500
179	SARIGLAGAH	19,413,000	9,706,500	9,706,500
180	PESAREN	23,856,000	11,928,000	11,928,000

No	DESA	JUMLAH BAGI HASIL PAJAK	TAHAP I 50%	TAHAP II 50%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
181	SIDOREJO	22,481,000	11,240,500	11,240,500
182	CEPAGAN	22,908,000	11,454,000	11,454,000
183	MASIN	21,554,000	10,777,000	10,777,000
184	BANJIRAN	21,021,000	10,510,500	10,510,500
185	WARUNGASEM	21,234,000	10,617,000	10,617,000
186	GAPURO	22,122,000	11,061,000	11,061,000
187	KALIBELUK	27,319,000	13,659,500	13,659,500
188	SAWAHJOHO	20,792,000	10,396,000	10,396,000
189	CANDIARENG	23,138,000	11,569,000	11,569,000
190	LEBO	24,115,000	12,057,500	12,057,500
191	MENGUNENG	21,098,000	10,549,000	10,549,000
192	TERBAN	23,071,000	11,535,500	11,535,500
193	SIJONO	20,109,000	10,054,500	10,054,500
	KEC. KANDEMAN			
194	TEGALSARI	61,368,000	30,684,000	30,684,000
195	KANDEMAN	48,412,000	24,206,000	24,206,000
196	BAKALAN	27,168,000	13,584,000	13,584,000
197	DEPOK	40,326,000	20,163,000	20,163,000
198	UJUNG NEGORO	51,372,000	25,686,000	25,686,000
199	JURAGAN	25,470,000	12,735,000	12,735,000
200	TRAGUNG	23,448,000	11,724,000	11,724,000
201	KARANGGENENG	40,369,000	20,184,500	20,184,500
202	CEMPERENG	19,332,000	9,666,000	9,666,000
203	BOTOLAMBAT	25,502,000	12,751,000	12,751,000
204	LAWANGAJI	20,337,000	10,168,500	10,168,500
205	KARANGANOM	20,987,000	10,493,500	10,493,500
206	WONOKERSO	27,719,000	13,859,500	13,859,500
	KEC. PECALUNGAN			
207	PECALUNGAN	21,565,000	10,782,500	10,782,500
208	BANDUNG	23,609,000	11,804,500	11,804,500
209	GOMBONG	20,101,000	10,050,500	10,050,500
210	RANDU	25,379,000	12,689,500	12,689,500
211	SIGUCI	23,502,000	11,751,000	11,751,000
212	PRETEK	30,839,000	15,419,500	15,419,500
213	SELOKARTO	29,057,000	14,528,500	14,528,500
214	GEMUH	26,516,000	13,258,000	13,258,000
215	GUMAWANG	30,203,000	15,101,500	15,101,500
216	KENITEN	20,564,000	10,282,000	10,282,000
	KEC. BANYUPITIH			
217	BANYUPUTIH	49,460,000	24,730,000	24,730,000
218	KALIBALIK	32,116,000	16,058,000	16,058,000
219	SEMBUNG	30,077,000	15,038,500	15,038,500
220	KEDAWUNG	29,903,000	14,951,500	14,951,500
221	DLIMAS	20,688,000	10,344,000	10,344,000
222	LUWUNG	21,629,000	10,814,500	10,814,500
223	KALANGSONO	23,060,000	11,530,000	11,530,000
224	PENUNDAN	26,970,000	13,485,000	13,485,000
225	BANARAN	29,890,000	14,945,000	14,945,000
226	TIMBANG	25,228,000	12,614,000	12,614,000
227	BULU	21,633,000	10,816,500	10,816,500

No	DESA	JUMLAH BAGI HASIL PAJAK	TAHAP I 50%	TAHAP II 50%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

KEC. BATANG				
228	ROWOBELANG	25,575,000	12,787,500	12,787,500
229	CEPOKOKUNING	23,321,000	11,660,500	11,660,500
230	PASEKARAN	31,556,000	15,778,000	15,778,000
231	KALISALAK	28,886,000	14,443,000	14,443,000
232	KECEPAK	23,144,000	11,572,000	11,572,000
233	KLIDANG WETAN	21,617,000	10,808,500	10,808,500
234	KLIDANG LOR	57,012,000	28,506,000	28,506,000
235	KALIPUCANG WETAN	21,969,000	10,984,500	10,984,500
236	KALIPUCANG KULON	25,960,000	12,980,000	12,980,000
237	KARANGANYAR	28,229,000	14,114,500	14,114,500
238	DENASRI KULON	25,442,000	12,721,000	12,721,000
239	DENASRI WETAN	23,462,000	11,731,000	11,731,000
		6,061,822,116	3,030,911,058	3,030,911,058

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIO SUDIBYO